

SANKSI KODE ETIK DAN UPAYA HUKUMNYA TERHADAP PELANGGARAN JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS DI KOTA BANJARMASIN

Oleh

Mardiantos¹, Sigid Riyanto²

INTISARI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai sanksi dan penegakan hukum yang diterapkan kepada Notaris yang telah melakukan pelanggaran dalam jabatannya serta upaya apa yang dapat dilakukan Notaris apabila dijatuhkan sanksi kode etik.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris yaitu penelitian yang mengutamakan kepada penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Untuk menunjang melengkapi data, maka dilakukan penelitian normatif yaitu dengan cara melakukan penelitian kepustakaan untuk menunjang penelitian lapangan tersebut yang berarti akan menelaah dan mengkaji data primer yang diperoleh dari penelitian tersebut. Penelitian kepustakaan dilakukan melalui studi dokumen dan kepustakaan. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara yang dilakukan dengan teknik wawancara *semi-structured*. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pelanggaran kode etik yang dijatuhkan kepada Notaris yang melanggar Pasal 3 ayat (9), ukuran papan nama yang tidak sesuai dengan ketentuan Kode Etik Notaris, Pasal 4 ayat (2), memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris di luar lingkungan Kantor, Pasal 4 ayat (3) huruf b, melakukan publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau karangan bunga dalam bentuk ucapan selamat pada pembukaan cabang, Majelis Pengawas telah memberikan teguran lisan dan teguran tertulis.(2). Bagi Notaris yang telah dijatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik dapat melakukan upaya pembelaan diri, mengajukan keberatan kepada Majelis Pengawas yang lebih tinggi.

Kata Kunci : Sanksi, Kode Etik, Notaris

¹ Jalan M. Yamin Gg. Swakarya III, Nomor 27 B, Kota Baru, Pontianak

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

**ETHICAL SANCTIONS AND LEGAL EFFORTS
AGAINST MALFEASANCE COMMITTED
BY NOTARY IN BANJARMASIN**

By

Mardiantos¹, Sigid Riyanto²

ABSTRACT

The purpose of the research is to find out about law enforcement and sanctions that are applied to a notary public who have committed malfeasance as well as the efforts of what can be done when the notary public code of ethics were dropped.

This research is empirical juridical, which give priority to the research field to obtain primary data. For complete data, normative research performed by research libraries to support field research which means it will be studying and reviewing primary data obtained from the study. The research study was done through libraries and document libraries. While the fieldwork was done through conducted with semi-structured interview techniques. The data obtained were analyzed qualitatively.

The result of the research showed that: (1) code of ethics breaches by notary is punished for violation to article 3 clause (9), about name plate, which isn't suitable to notary code of ethic rule, article 4 clause (2), installing name plate and/or script state that: "Notary/Office of Notary outside purview, Article 4 clause (3) letter b, to publish or promote with entering name and position uses media and/or bouquet, which is designed of Congratulation on the Branch opening, Supervisor Assembly challenges in verbal or writing. (2) For Notary Fitted punished by ethical code breaching can plead themselves, submit a protest to Higher Supervisor Assembly.

Keyword : sanction, code of ethics, notary

¹ Jalan M. Yamin Gg. Swakarya III, number 27. B Kota Baru, Pontianak

² Faculty Of Law Gadjah Mada University, Yogyakarta